



RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Jemur Andayani No. 1 Surabaya
Telp. (031) 8477551, Faks (031) 8477404

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa perlu penyelarasan dokumen perencanaan mulai dari RPJMN, RPJMD, RKPD, Renstra PD, hingga Renja PD. Sebagai tindak lanjut penyelarasan tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Dengan penyelarasan tersebut, maka Renstra BKD Provinsi Jawa Timur yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur juga dilakukan pengkajian dan perubahan.

Berdasarkan hal tersebut, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang merupakan rencana kerja tahunan juga perlu diselaraskan dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2019. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil berupaya terus menerus untuk dapat menjadi lembaga yang amanah, profesional, dan akuntabel di dalam pengelolaan manajemen SDM Aparatur agar dapat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terukur,

tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma/ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu dalam penyusunan rencana kerja yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian, peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan SDM Aparatur, peningkatan kualitas penataan Pegawai Negeri Sipil, peningkatan kualitas informasi manajemen kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui program dan kegiatan yang terencana dan terintegrasi sesuai dengan tuntutan masyarakat yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 didasarkan kepada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014-2019 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019, dimana rencana programnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 58 Tahun 2007, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN

6. Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN
7. Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
8. Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur
9. Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam pengusulan pendanaan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
18. Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan jangka pendek serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2018.

1.4 Permasalahan

1. Masalah Pengembangan Budaya Kerja

Kendala internal yang dihadapi dalam upaya mewujudkan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur bersumber juga pada belum

optimalnya penerapan nilai-nilai budaya kerja terutama budaya pelayanan sebagai satu sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati dan dijadikan pedoman tingkah laku. Akibatnya berbagai masalah yang berhubungan dengan adaptasi eksternal dan integrasi internal belum sepenuhnya mengarah kepada perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktifitas yang diharapkan.

2. Masalah Peningkatan Koordinasi Internal

Keterpaduan perencanaan dalam RENSTRA, baik keterpaduan program maupun sasaran, memerlukan kemantapan koordinasi dalam pelaksanaan, pemantauan, sinkronisasi dan evaluasi pada tataran operasionalnya, khususnya koordinasi antar bidang dan internal bidang. Oleh karenanya dengan semakin meningkatnya tuntutan peningkatan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur, diperlukan pemantapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkelanjutan.

3. Masalah peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara

Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mendesak untuk dilaksanakan agar tetap mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keahian dan perilaku yang terus berkembang sesuai dinamika perubahan, terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mulai Januari 2014 ini serta peraturan-peraturan lain yang mengikutinya. Kompetensi aparatur yang perlu mendapat perhatian adalah terutama dalam aspek E 3. *Pertama*; pemberdayaan (*empower*) yaitu memberi kesempatan agar mampu mengembangkan bakat dan keterampilan dan kontribusinya pada institusi dan masyarakat. *Kedua*; pembelajaran (*educate*) yaitu bekal pembelajaran untuk menambah pengetahuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis. *Ketiga*; pencerahan (*enlighten*) yaitu membuka wawasan aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk

berpikir maju, dinamis dan kreatif yang mengarah pada perubahan peningkatan kinerja organisasi.

4 Masalah Optimalisasi Hasil Program dan Kegiatan

Dampak dari belum optimalnya konsistensi sasaran program dan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah serta belum optimalnya komitmen untuk berbuat yang terbaik dari seluruh jajaran organisasi, dikhawatirkan akan dapat menghambat tercapainya sasaran hasil atau manfaat (*outcome*) yang diharapkan dari setiap kegiatan operasional dan cenderung menghasilkan *output* semata.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan Tahun 2018 mengacu pada kesesuaian dengan dokumen RKPD dan dokumen Renstra Tahun 2014 - 2019

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Input : Dana sebesar Rp. **2.481.095.500,-** terealisasi sebesar Rp. **2.427.507.153,-** Persentase capaian kinerjanya **100 %**

Output : - Prosentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP.
- Prosentase fasilitasi penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP.

Outcome : Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor.

Evaluasi kinerja :

- Peningkatan efektifitas pelayanan di internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :

Input : Dana sebesar **Rp. 649.406.500,-** terealisasi sebesar **Rp. 641.082.909,-** Persentase capaian kinerjanya **100 %**

Output : - Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor
- Jumlah Penerbitan Buletin

Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

Evaluasi kinerja :

- Perlu adanya peningkatan kualitas penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana :

Input : Dana sebesar **Rp. 2.350.668.000** terealisasi sebesar **Rp. 2.333.521.588**. Persentase capaian kinerjanya **100 %**

Output : Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Outcome : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

Evaluasi kinerja :

- Perlu adanya peningkatan kualitas pemeliharaan rutin berkala khususnya pemeliharaan rutin berkala pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah :

Input : Dana sebesar **Rp. 860.760.000** terealisasi sebesar **Rp. 835.692.080**. Persentase capaian kinerjanya **100 %**

Output : Persentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian

Outcome : Persentase kelembagaan yang tepat fungsi.

Evaluasi kinerja :

- Optimalisasi implementasi rumusan kebijakan kepegawaian sesuai dengan Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara)

b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Input : Dana sebesar **Rp. 858.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 844.200.380.** Persentase capaian kerjanya **100 %**

Output : Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu

Outcome : Persentase kelembagaan yang tepat fungsi.

Evaluasi kinerja :

- Optimalisasi pelayanan kepegawaian internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan ukuran nilai IKM Internal.

4. Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Penyusunan dokumen perencanaan :

Input : Dana sebesar **Rp. 118.900.000** terealisasi sebesar **Rp. 118.878.795.** Persentase capaian kerjanya **100%**

Output : Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dan tepat waktu

Outcome : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu.

Evaluasi kinerja :

- Konsistensi dokumen penyelenggaraan dengan RPJMD harus lebih di optimalkan

b. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran :

Input : Dana sebesar **Rp. 259.100.000** terealisasi sebesar **Rp. 258,967,325,-** Persentase capaian kerjanya **100%**

Output : Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi laporan program dan kegiatan

Outcome : Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu.

Evaluasi kinerja :

- Optimalisasi hasil pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan dengan indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya :

Input : Dana sebesar **Rp. 1.191.306.005,-** terealisasi sebesar **Rp 1.169.188.265,-** Persentase capaian kinerjanya 100%

Output :- Jumlah pegawai ASN yang telah dianalisa kompetensi manajemen aparatur

- Jumlah SKPD yang dianalisa kebutuhan pengembangan Aparatur
- Jumlah SKPD yang dianalisa kebutuhan JFT
- Jumlah pejabat Es III yang mengikuti development center
- Jumlah pelaksanaan pembekalan jiwa entrepreneurship bagi ASN
- Jumlah Assesor penilaian kompetensi teknis aparatur
- Jumlah ASN yg mengikuti sertifikasi di bidang TIK

Outcome : Persentase tingkat pengembangan kompetensi SDM Aparatur

Evaluasi kinerja :

Untuk tingkat pengembangan kompetensi SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan – kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur dan juga pengembangan karir diantaranya kegiatan ujian dinas, penyesuaian ijazah dan pengembangan kompetensi, tugas belajar dan lain sebagainya.

Tabel 2.1
Data Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur

No	Uraian	2014	2015	2016
1.	Ujian Dinas	110	94	52
2.	Ujian Penyesuaian Ijazah (KPPI)	103	66	198
3.	Seleksi pangkat III/d ke IV/a	88	36	59
4.	Tugas Belajar S1,S2,S3	45	21	72
5.	Izin Belajar	160	178	160
6.	Pembekalan Jiwa Entrepreneurship			
	- Angkatan I	-	25	
	- Angkatan II	-	25	
	- Angkatan III	-	23	
	- Angkatan IV	-	24	49
JUMLAH		506	314	590

Sumber Data : Bidang Forbang subbid pengembangan Pegawai 31 Desember 2016

Sebagaimana tabel diatas untuk pengembangan kompetensi pegawai sampai dengan Tahun 2016 Pegawai ASN yang telah dan lulus mengikuti kediklatan, baik itu diklat kepemimpinan, diklat fungsional. Dan diklat tehnis, maupun kediklatan lainnya berjumlah 14.149 Orang, artinya bahwa hak setiap pegawai untuk dapat mengikuti kediklatakan dalam rangka untuk pengembangan kualitas dari pada pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berjalan sesuai dengan rencana dan upaya BKD dalam meningkatkan kualitas SDM, sedangkan sisa sebesar 5.503 pegawai rencananya akan di kembangkan kompetensinya di Tahun 2017.

Permasalahan:

- a) Pelaksanaan ujian dinas/ujian penyesuaian masih belum adanya standart kelulusan, sehingga ujian hanya sebatas legalitas dari pelaksanaan ketentuan yang ada.

- b) Belum adanya perencanaan yang ideal akan kebutuhan JFU (jabatan pelaksana) maupun JFT.
- c) Kurangnya kewenangan di dalam pengembangan atau development center bagi eselon III.
- d) Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum adanya badan sertifikasi, sehingga untuk menjadikan PNS yang memiliki kompetensi di bidang IT dan bersertifikasi masih belum optimal. Hal ini sesuai dengan UU No 5 tahun 2004 dan UU No 23 tahun 2014 ada 4 (empat) kompetensi yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi pemerintahan.

b. Perencanaan kepegawaian dan formasi.

Input : Dana sebesar **Rp. 469.198.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 464.426.545,-** Persentase capaian kinerjanya **100 %**

Output : - Jumlah SKPD yang telah disosialisasikan Pergub tentang jabatan pelaksana
 - Jumlah pelaksanaan Workshop bezzeting e-formasi
 - Jumlah dokumen analisis kebutuhan aparatur jabatan fungsional umum/pelaksana

Outcome : Persentase SKPD dan UPT yang telah menyusun perencanaan pegawai.

Evaluasi kinerja :

- a) Belum ada perencanaan pegawai berbasis jabatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.
- b) Belum sinkron kebutuhan pegawai (bezzeting pegawai) setiap SKPD dengan perencanaan yang dilakukan oleh BKD Provinsi Jawa Timur.
- c) Belum adanya kekuatan hukum/produk hukum yang mendukung perencanaan akan kebutuhan pegawai.

c. Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Serta Penghargaan

Input : Dana sebesar Rp. **388.949.800,-** terealisasi sebesar Rp. **385.022.791,-** Persentase capaian kinerjanya **91%**

Output : - Prosentase pegawai yang tidak melakukan pelanggaran kedisiplinan PNS.
- Prosentase tingkat kehadiran pegawai
- Jumlah pelaksanaan penggandaan peraturan kepegawaian
- Jumlah penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawain PNS
- Jumlah laporan Bimtek pembinaan pegawai
- Jumlah laporan verifikasi LP2P
- Jumlah laporan Bimtek LP2P
- Jumlah dokumen konsultasi pelanggaran kepegawaian
- Jumlah aplikasi e-presentasi /absen
- Jumlah laporan sidak disiplin pegawai

Outcome : Persentase penetapan pemberian, penghargaan kinerja pegawai yang obyektif, transparan, dan akuntabel.

Evaluasi kinerja :

- a) Kurang optimalnya penegakan disiplin pegawai, hal ini sanksi bagi pegawai yang belum melaporkan harta kekayaan, LP2P, maupun datang terlambat belum optimal.
- b) Kurangnya pengawasan audit internal, baik itu menyangkut permasalahan kepegawaian atau audit kepegawaian (non keuangan) maupun permasalahan keuangan.
- c) Minimnya dana atau anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bappeda) dalam rangka pemberian penghargaan bagi PNS yang akan

purna tugas agar meningkat harapan hidup PNS yang akan purnah tugas tersebut.

6. Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur dengan 5 (lima) kegiatan yaitu :

a. Seleksi rekrutmen pegawai yang transparan dan bebas KKN melalui sistem CAT :

Input : Dana sebesar Rp. **209.616.145,-** terealisasi sebesar Rp.**204.579.645,-** Persentase capaiannya **50 %**

Output : - Jumlah dokumen penyusunan naskah TKB
- Jumlah laporan ujian ASN/PPTK pelamar umum sistem CAT

Outcome : Persentase penataan SDM aparatur sesuai formasi kebutuhan

Evaluasi kinerja :

Dalam rangka untuk pememenuhan akan kebutuhan pegawai, BKD telah mengusulkan formasi khusus untuk memenuhi kebutuhan akan dokter spesialis, umum dan gigi, memfasilitasi IPDN Jawa Timur yang lulus untuk magang di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengevaluasi dan menganalisa serta memperdayagunakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) khususnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau pada Rumah sakit umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, demikian juga untuk seleksi IPDN diambil oleh pemerintah pusat.

b. Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

Input : Dana sebesar Rp. **2.146.582.250,-** terealisasi sebesar Rp.**2.106.002.831,-** Persentase capaiannya **98,8 %**

Output : - Prosentase pelaksanaan pelantikan dan sertijab
- Prosentase penyelesaian pensiun pegawai ASN

- Prosentase proses kenaikan pangkat
- Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan

Outcome : Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan

Evaluasi kinerja :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Perpindahan Pegawai
di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Perpindahan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	77	48	43
2	Perpindahan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur	527	475	383
3	Antar Provinsi (usulan)	323	308	417
4	Mutasi/pelimpahan masuk menjadi PNSD Provinsi Jawa Timur	124	95	35.797
JUMLAH		1.051	926	36.640

Sumber Data : Bidang Mutasi subbid pangkat, pindah, pensiun Pegawai 31 Desember 2016

Salah satu upaya untuk mengisi formasi kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi antara lain menerima pelimpahan pegawai dari luar menjadi PNS daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun demikian untuk dapat diterima dan melimpah menjadi PNSD Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi semua proses mutasi harus dilakukan dengan tes bakat dan kemampuan. Dalam rangka penataan pegawai yang sesuai kompetensi dan kebutuhan ada 926 PNS yang beralih status menjadi PNS Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sekitar 11.8 % dari tahun 2014 dari sebelumnya sebanyak 1.051 pegawai .

Pengalihfungsian pegawai negeri sipil (PNS) dari jabatan fungsional umum (JFU) ke jabatan fungsional tertentu (JFT) merupakan aktivitas

penataan pegawai dalam rangka memenuhi kekurangan akan tenaga fungsional tertentu (JFT). BKD Provinsi telah berupaya untuk memenuhi kekurangan tenaga pegawai dengan Jabatan Fungsional tertentu JFT, berbagai upaya mulai dari pemberian informasi secara terbuka, menawarkan kepada SKPD yang kelebihan pegawai dengan jabatan fungsional umum (JFU), dan memberikan fasilitas kepada pegawai untuk program diklat fungsional tertentu, dan mempermudah penyelesaian administrasi kepada pegawai yang akan beralihfungsi dari jabatan fungsional umum ke fungsional tertentu, berikut hasil pengalihan fungsi dari jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu

Tabel 2.3

Rekapitulasi pengalihan fungsi JFU ke JFT

No	Uraian	2014	2015	2016
1	Pengalihan fungsi Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional (JFT)	89	198	72
JUMLAH		89	198	72

Sumber Data : Bidang Mutasi subbid jabatan Pegawai 31 Desember 2015

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan akhir 2016 terealisasi sebanyak 72 pegawai yang telah dialihfungsikan dari Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional. Hal ini berarti pengalihan fungsi Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan pengalihan fungsi Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional memerlukan proses analisis kepegawaian yang cukup panjang, sosialisasi dan pengenalan jabatan fungsional, analisis kebutuhan dana, analisis kebutuhan diklat fungsional, serta dilakukan uji psikotest untuk mencari bakat/penjurusan.

Sesuai dengan hasil Pemetaan Kebutuhan Pegawai tahun 2016 bahwa pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih kekurangan tenaga pegawai fungsional tertentu, sehingga untuk mengantisipasi/menutupi kekurangan tenaga fungsional tersebut Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menawarkan, mensosialisasikan, selanjutnya dilakukan pendidikan dan latihan jabatan fungsional tertentu sebagai salah satu syarat pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional tertentu.

Dalam pelaksanaan penataan SDM aparatur yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya perlu direncanakan secara baik dan terarah yaitu dapat dimulai dengan melakukan proses analisis pegawai atau penilaian pegawai secara ketat, selektif dengan menyediakan ruang yang lebih terbuka untuk berkompetensi. Hal tersebut dimaksudkan agar penetapan dan penempatan pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural sesuai kebutuhan dan kompetensinya, yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Sebagai pengelola manajemen SDM aparatur, BKD Provinsi Jawa Timur harus mempunyai peranan yang besar dalam hal penataan dan penempatan pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural, agar dihasilkan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya baik itu tingkat pendidikan, tingkat kemampuan, tingkat keahlian dengan selektif dengan berbagai upaya yang telah dilakukan mulai dari evaluasi kinerja PNS, uji kompetensi bagi PNS III/c ke atas, evaluasi dan analisis oleh tim Baperjakat, dan di masa mendatang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka untuk lebih transparan penataan dalam jabatan struktural akan dilaksanakan melalui pengisian lowongan jabatan yang lowong secara terbuka.

Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pengangkatan jabatan struktural yang dibutuhkan, dan telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi yaitu terdiri dari eselon II.a, eselon II.b, eselon III.a, Eselon III.b, dan eselon IV.a. Sampai dengan Desember 2016 sebanyak 2.048 pejabat struktural telah ditetapkan pengangkatan dalam jabatan telah sesuai dengan kompetensi dan

kebutuhan, baik itu kriteria syarat jabatan, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan kediklatan yang pernah diikuti oleh seorang pegawai yang akan diangkat dalam jabatan struktural, dan juga sudah melalui proses analisis dan evaluasi oleh Tim Baperjakat serta berpedoman pada Perka BKN tentang syarat dan standar jabatan, sehingga pada tahun 2016 BKD Provinsi bersama tim Baperjakat telah menetapkan pejabat struktural mulai eselon I sampai dengan IV sebanyak 2.048 pejabat struktural sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
Data Pendistribusian Pejabat Struktural Hasil Tim Baperjakat

No	Uraian	2014	2015	2016
1.	Pendistribusian pejabat struktural hasil Tim Baperjakat	1.922	538	2.048
JUMLAH		1.922	538	2.048

Sumber Data : Bidang Mutasi subbid pangkat,pindah dan pensiun Pegawai 31 Desember 2016

Permasalahan:

- a) Belum tersusunnya standart kompetensi (manajerial, tehnik, sosio kultural, dan pemerintahan) di dalam proses penataan dan pendistribusian pegawai.
 - b) Pelaksanaan penataan dan pendistribusian pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan di masing-masing SKPD.
- c. Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka
- Input** : Dana sebesar Rp. **218.417.750,-** terealisasi sebesar Rp.**212.797.411,-** Persentase capaian kinerjanya **100 %**
- Output** : - Prosentase penempatan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya
- Jumlah pelaksanaan pengisian lowongan jabatan secara terbuka

Outcome : Persentase penataan SDM aparatur sesuai formasi kebutuhan

Evaluasi kinerja :

Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan lelang jabatan secara terbuka untuk jenis jabatan tinggi pratama (eselon II) jumlah jabatan lowong sebanyak 8 jabatan lowong dengan target 80 % adapun realisasi sebesar 80 % dimana formulasi perhitungannya jumlah jabatan lowong di bagi dengan pengisian jumlah jabatan yang diisi secara terbuka dengan terealisasi sebesar 100 %.

Adapaun nama – nama jabatan lowong yang di umumkan secara terbuka sebagai berikut :

1. Kepala Biro Administrasi Perekonomian
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
3. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4. Kepala Biro Organisasi
5. Kepala Dinas Pendapatan
6. Kepala Dinas Pertanian
7. Wadir Pendidikan Profesi dan Penelitian RSUD Dr. Soetomo
8. Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Haji Surabaya

Permasalahan:

- a) Minimnya pendaftar karena etika dan budaya ewuh pakewuh perasaan malu jika gagal dan adanya anggapan kurang kredibel.
- b) Belum adanya standart penilaian yang objektif didalam menentukan dan menetapkan pegawai di dalam jabatan.
- c) Belum adanya standart kompetensi pegawai setelah Undang-Undang ASN diberlakukan.

d. Penetapan standar kompetensi jabatan dan pola karir

Input : Dana sebesar Rp. **237.679.850,-** terealisasi sebesar Rp.**213.400.990,-** Persentase capaian kerjanya **80 %**

Output : - Jumlah pergub tentang standart kompetensi jabatan di lingkungan pemprov Jawa Timur
- Jumlah dokumen penyusunan standart kompetensi pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemprov Jawa Timur

Outcome : Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan

Evaluasi kinerja :

Pada tahun 2016 BKD Provinsi Jawa Timur menargetkan 39 SKPD dan UPT yang telah menyusun standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi bagi yang disusun adalah untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama artinya BKD Provinsi telah berupaya meningkatkan kualitas SDM khususnya untuk pejabat struktural eselon II, dengan menyusun standart kompetensi mulai dari kemampuan atau kompetensi dasar (akademik), kompetensi tehnik, kompetensi sosio kultur, kompetensi pemerintahan, maupun dengan melihat rekam jejak seorang PNS mulai dari CPNS sampai dengan akan dinilai dan diangkatnya PNS pada jabatan struktural tertentu.

Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan dan pola karier pegawai untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana. Penerapan pola karier di setiap lingkup SKPD juga masih belum optimal.

e. Peningkatan kesejahteraan aparatur, penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan.

Input : Dana sebesar Rp. **764.270.200,-** terealisasi sebesar Rp. **758.353.265,-** Persentase capaian kerjanya **86 %**

Output : - Prosentase capaian rata-rata komulatif atas sasaran kinerja ASN

- Jumlah laporan Bimtek penyusunan SKP
- Jumlah laporan Bimtek pengu-sulan satya lencana berbasis WEB
- jumlah dokumen pengusulan satya lencana
- Jumlah dokumen evaluasi kinerja.
- Jumlah aplikasi e-SKP
- Jumlah laporan pembekalan wirausaha bagi PNS yg akan purna tugas

Outcome : Prosentase capaian rata kumulatif atas Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja bagi Aparatur Sipil Negara

Evaluasi kinerja :

Untuk indikator persentase capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN dengan target Baik atau rentang nilai 76-90 dengan persentase rata-rata realisasinya sebesar 86% termasuk kategori "**Baik**". Artinya BKD sebagai Pembina dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sudah berjalan sesuai dengan rencana. Upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai agar optimal salah satunya dengan sosialisasi, atensi, dan pembekalan penyusunan SKP dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Adapun permasalahan didalam penyusunan SKP Kendala yang dihadapi dalam proses penjaringan data untuk indikator indikator persentase capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN untuk pelaporan SKP di masing-masing SKPD sering terlambat sehingga untuk penyusunan rekap per SKPD mengalami kendala solusi pemecahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan melakukan monitoring ke masing-masing SKPD setiap per triwulan untuk melakukan pendampingan penyusunan SKP dan pada tahun 2016 sudah direncanakan aplikasi untuk mengakomodir pengisian SKP dengan sistem aplikasi e-skp.

7. Program pengembangan data informasi dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai :

Input : Dana sebesar Rp. **1.410.000.000,-** terealisasi sebesar Rp. **1.408.952.400** Persentase capaian kinerjanya **85 %**

Output : - Prosentase tingkat akurasi dataase kepegawaian dan file tatanaskah
- Jumlah aplikasi SIMPEG berbasis WEB
- Prosentase tingkat akurasi file tatanaskah pegawai perorangan

Outcome : Prosentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkait, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

Evaluasi kinerja :

Indikator kinerja persentase tingkat database kepegawaian dan file tata naskah kepegawaian perorangan dengan capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas data pegawai ASN yang akurat dan file tata naskah perorangan dengan data pendukung data pokok pegawai perorangan dan ceklist dokumen file tata naskah pegawai perorangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur target 100% dapat terealisasi 85% yang artinya capaian kinerja 85 %, artinya dari data base pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 54.836 pegawai (termasuk pelimpahan pegawai yang masuk Pemprov Jatim) teralisasi 85 % atau sebanyak 46.610 pegawai.

Aadapun validatas data kepegawaian tersebut meliputi : data pokok (riwayat pangkat, golongan, nama jabatan, pendidikan, dan data lainnya dibandingkan dengan data fisik yang sudah valid, cocok, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pada Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan updating data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk proses entri file data, updating data, dan proses peremajaan data secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka

untuk memvalidkan data pegawai agar data pegawai tersebut benar-benar berkualitas atau data tersebut handal, akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Data yang berkualitas yang akurat diperlukan proses up-dating yang terus menerus berkelanjutan selama PNS masih menjadi PNS, sampai dengan PNS tersebut pensiun atau meninggal dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa BKD Provinsi Jawa Timur telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya yaitu menjadikan BKD Provinsi Jawa Timur sebagai pusat informasi kepegawaian di Jawa Timur, salah satunya database kepegawaian harus terupdating, sehingga database kepegawaian tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota terkait dengan kenaikan pangkat, penentuan pensiun, dan kebijakan-kebijakan lainnya terkait dengan permasalahan kepegawaian.

Updating data sangat diperlukan, apalagi terkait dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga data PNS wajib diperbarui dan di updating, baik itu penyesuaian riwayat pendidikan, kepangkatan, nomenklatur, nama jabatan, dan uraian tugas maupun data lainnya.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD S/D Tahun 2016

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Urusan Pemerintahan					
					Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1	20	1700	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/aparat ur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	85	84,5	84,5	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	01	019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1. Persentase ketepatan penyelesaian administrasi surat sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100 %
						2. Persentase fasilitasi penyediaan makanan dan minuman dalam menunjang kegiatan BKD dan sekretariat sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %
1	20	1700	02	012	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1. Jumlah penerbitan buletin BKD 2. Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai SOP	20 100 %	4 100 %	4 100 %	100 % 100 %
1	20	1700	02	031	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %
1	20	1700	07	001	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Prosentase dokumen rumusan kebijakan kepegawaian	100%	100%	100%	100 %
1	20	1700	07	002	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Jumlah dokumen hasil survey IKM pelayanan kepegawaian 2. Persentase pelayanan kepegawaian	5 100 %	1 100 %	1 100 %	100 % 100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						yang diselesaikan tepat waktu				
1	20	1700	08		Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
1	20	1700	08	001	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai dan tepat waktu	20	4	4	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	08	002	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi laporan program dan kegiatan	20	4	4	100 %
1	20	1700	41		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase penataan SDM aparatur sesuai formasi dan kebutuhan	100 %	100 %	86 %	86 %
1	20	1700	41	019	Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya	1. Jumlah pegawai ASN yg dianalisa kompetensi mgt aparatur 2. Jumlah SKPD yg dianalisa kebutuhan pengembangan	450 49	80 49	80 49	80 49

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Aparatur				
		3. Jumlah SKPD yg dianalisa kebutuhan JFT	49	49	49	100%
		4. Jumlah pejabat Es III yg didevelopmen center	100	25	25	100%
		5. Jumlah pelaksanaan pembekalan jiwa enterpreneurship bagi ASN	10	2	2	100%
		6. Jumlah Assesor penilaian kompetensi tehnik aparatur	30	10	10	100%
		7. Jumlah ASN yg disertifikasi di bidang TIK.	50	20	20	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	41	084	Perencanaan kepegawaian dan formasi	1. Sosialisasi pergub ttj jabatan pelaksana	49	49	49	100 %
						2. Jumlah pelaksanaan Workshop bezzeting e-formasi	1	1	1	100 %
						3. Jumlah dokumen analisis kebutuhan aparatur jabatan fungsional umum/pelaksana	1	1	1	100 %
1	20	1700	41	089	Penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kode etik pegawai serta penghargaan	1. Prosentase pegawai yang tidak melakukan pelanggaran kedisiplinan PNS.	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						2. Prosentase tingkat kehadiran pegawai	100 %	100 %	91 %	91%
						3. Jumlah pelaksanaan penggandaan peraturan kepegawaian	5	1	1	100 %
						4. Jumlah penyelesaian pemberian/penolakan ijin perceraian dan perkawain PNS	5	1	1	100 %
						5. Jumlah laporan Bimtek pembinaan pegawai	5	1	1	100 %
						6. Jumlah laporan verifikasi LP2P	5	1	1	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						7. Jumlah laporan Bimtek LP2P	2	1	1	100 %
						8. Jumlah dokumen konsultasi pelanggaran kepegawaian	5	1	1	100 %
						9. Jumlah aplikasi e-presentasi /absen	1	1	1	100 %
						10. Jumlah laporan sidak disiplin pegawai	5	1	1	100 %
1	20	1700	94		Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur	Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan	100 %	100 %	98,8 %	98,8 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	94	001	Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN melalui Sistem CAT	1. jumlah dokumen penyusunan naskah TKB	5	1	1	100%
						2. Jumlah laporan ujian ASN/ PPTK pelamar umum sistem CAT	5	1	1	100%
1	20	1700	94	002	Penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	1. Prosentase pegawai ASN yg ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensinya	100 %	100 %	98,8 %	98,8 %
						2. Prosentase pelaksanaan pelantikan dan sertijab	100 %	100 %	100 %	100 %
						3. Prosentase penyelesaian pensiun pegawai ASN	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						4. Prosentase proses kenaikan pangkat	100 %	100 %	100 %	100 %
						5. Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan	100 %	100 %	98,8 %	98,8 %
1	20	1700	94	004	Seleksi pengisian lowongan jabatan secara terbuka	1. Prosentase penempatan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	100 %	100 %	100 %	100 %
						2. Jumlah pelaksanaan pengisian lowongan jabatan secara terbuka	5	3	3	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
1	20	1700	94	005					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	94	005	Penetapan standart kompetensi jabatan dan pola karir	1. Prosentase tingkat pengembangan kompetensi SDM Aparatur 2. Jumlah pergub tentang standart kompetensi jabatan di lingkungan pemprov 3. Jumlah dokumen penyusunan standart kompetensi pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemprov 4. Prosentase SKPD dan UPT	100 % 1 1 100 %	100 % 1 1 100 %	75 % 1 1 80 %	100 % 100 % 100 % 80 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						yang menyusun standart pola karier 5. Jumlah dokumen pergub ttg standart pola karier	1	1	1	100 %
1	20	1700	94	006	Peningkatan kesejahteraan aparatur ,penilaian prestasi dan sasaran kinerja pegawai serta penghargaan	1. Prosentase capaian rata-rata komulatif atas sasaran kinerja ASN 2. Jumlah laporan Bimtek penyusunan SKP 3. Jumlah laporan Bimtek pengu-sulan satya lencana berbasis WEB 4. jumlah dokumen	100 % 5 5 5	100 % 1 1 1	100 % 1 1 1	100 % 100% 100% 100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						<p>pengusulan satya lencana</p> <p>5. Jumlah dokumen evaluasi kinerja.</p> <p>6. Jumlah aplikasi e-SKP</p> <p>7. Jumlah laporan pembekalan wirausaha bagi PNS yg akan purna tugas</p>	<p>5</p> <p>1</p> <p>5</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
1	20	1700	97		Program Pengembangan Data Informasi	Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	100 %	100 %	85 %	85 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2015-2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-2) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
1	20	1700	97	007					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2016 (Tahun n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	20	1700	97	007	Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	1. Prosentase tingkat akurasi dataase kepegawaian dan file tatanaskah 2. Jumlah aplikasi SIMPEG berbasis WEB 3. Prosentase tingkat akurasi file tatanaskah pegawai perorangan	100 % 3 100%	100 % 1 100%	85 % 1 85%	85 % 100 % 85%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Untuk analisis kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan diuraikan melalui penjelasan capaian tiap program kinerja pelayanan yang ada dan pada tahun 2016 kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang baik dalam melaksanakan program dan arah kebijakan organisasi. Evaluasi program prioritas tahun anggaran 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat, dan image masyarakat untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan oleh BKD Provinsi Jawa Timur, kinerja aparat pelayanannya, dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanannya, dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, khususnya pengguna jasa pelayanan, dalam hal ini PNS di Provinsi Jawa Timur maupun PNS dari Provinsi lainnya sehingga tercapai suatu kepuasan yang diwujudkan dalam nilai IKM. Nilai IKM dalam pelayanan tersebut mengacu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu terdiri dari 14 unsur penilaian yaitu: (1) Prosedur pelayanan,; (2) Persyaratan pelayanan,; (3) Keberadaan petugas pelayanan,; (4) Kedisiplinan petugas pelayanan,; (5) Kemampuan petugas pelayanan,; (6)

Kecepatan pelayanan,; (7) Keadilan mendapatkan pelayanan,; (8) Kesopanan petugas,; (9) Keramahan petugas ,; (10) Kewajaran biaya pelayanan,; (11) Kesesuaian biaya pelayanan,; (12) Kepastian jadwal pelayanan,; (13) Kenyamanan lingkungan,; (14) Keamanan pelayanan.

Pada tahun 2016 BKD Provinsi Jawa Timur menargetkan nilai IKM 84,5 terealisasi 84.5 sehingga capaian kinerjanya yaitu 100% atau dengan katagori "Baik", hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur memuaskan dan mendapatkan apresiasi yang baik oleh pengguna jasa pelayanan maupun oleh Pemerintah pusat. Berikut perkembangan nilai IKM, target dan realisasi mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 tergambar pada tabel

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan
Tahun 2009-2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi								Capaian
	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 (baik)	82,63 (baik)	82,85 (baik)	83 (baik)	83,98 (baik)	83,98 (baik)	84 (Baik)	84,24 (baik)	84,5 (baik)	83.65 (baik)

Pandangan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur itu baik, tidak terlepas dengan adanya program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari penerapan standart sistem manajemen ISO 9001:2008, penggunaan sarana IT secara on line sistem melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan didukung oleh SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawian) berbasis computer dan WEB yang terkoneksi keseluruhan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Pada tahun 2009 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mendapatkan apresiasi yang baik terhadap kinerja pelayanan, dan diberikan penghargaan oleh Badan sertifikasi dunia URS (United Register of Sistem) Nomor: Nomor 42179/A/001/UK/EN yaitu sertifikasi ISO: 9001:2008 sebagai penyelenggara pelayanan yang telah memenuhi standar mutu manajemen.

Pada tahun 2011 mendapatkan penghargaan BKN Award, Percontohan proyek penerimaan seleksi CPNS dengan system CAT (Computer Assisted Test), sebagai penyelenggaraan manajemen kepegawaian terbaik, dan sampai dengan tahun 2012 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan BKN Award 2012 Tingkat Nasional dari Kepala BKN pada tanggal 30 Mei 2012 di gedung BKN Jakarta, Penghargaan BKN Award 2012 Tingkat Provinsi Jawa Timur dari Kepala Kantor Regional II BKN pada tanggal 30 Mei 2012 di gedung Kantor Regional II BKN di Jalan Jenderal S. Parman Waru – Sidoarjo. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sangat memuaskan.

2.3 Isu– Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ada beberapa Isu-isu strategis antara lain :

Tabel 2.7
Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

NO	ISU – ISU STRATEGIS	URAIAN
1	Perkembangan Sosial Politik	<p>Penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah yang ditumpangi bahkan di dominasi oleh muatan dan kepentingan politik di masa datang cenderung akan mendistorsi pembinaan karier jabatan struktural. Terutama akan lebih kentara dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan karier pada level manajerial tertentu yang tidak lagi berdasarkan pada kompetensi dan merupakan celah rawan terhadap campur tangan kekuatan politik serta kekuatan tertentu lainnya.</p> <p>Hal ini tentunya akan mengakibatkan orientasi pelayanan yang semestinya dijalankan dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat menjadi bergeser ke arah orientasi yang sifatnya politis dan pada gilirannya akan melahirkan politisasi birokrasi.</p>
2	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Arus globalisasi dan revolusi telematika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan tantangan

		<p>tersendiri bagi upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Namun demikian, apabila perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut tidak dimanfaatkan secara tepat dan tidak didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, tentunya hanya akan menghambat sistem penyelenggaraan manajemen kepegawaian secara keseluruhan.</p>
--	--	--

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Provinsi Jawa Timur

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
308.01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Surabaya	Indeks Kepuasan Masyarakat/aparat r terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	85%	4,611,474,155	308.01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Surabaya	Indeks Kepuasan Masyarakat/aparat ur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	85%	4,611,474,155
308.01.019	a Pelaksanaan administrasi perkantoran	Surabaya	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%	4,611,474,155	308.01.019	a Pelaksanaan administrasi perkantoran	Surabaya	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%	4,611,474,155
308.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Surabaya	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	6,480,721,595	308.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Surabaya	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	6,480,721,595
308.02.012	a Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Surabaya	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	135 unit	2,969,681,833	308.02.012	a Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Surabaya	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	135 unit	2,969,681,833
308.02.031	b Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Surabaya	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	135 unit	3,511,039,762	308.02.031	b Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Surabaya	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	135 unit	3,511,039,762

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
308.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Surabaya	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	2,540,429,250	308.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Surabaya	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	2,540,429,250
308.07.001	a Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Konsultasi	60 kali	1,369,845,625	308.07.001	a Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Konsultasi	60 kali	1,369,845,625
308.07.002	b Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Surabaya	1. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 2. Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	124 org 124 Org	1,170,583,625	308.07.002	b Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Surabaya	1. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 2. Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	124 org 124 Org	1,170,583,625
308.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Surabaya	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	483,750,000	308.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Surabaya	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	483,750,000
308.08.001	a Penyusunan dokumen perencanaan	Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 dok	210.000.000	308.08.001	a Penyusunan dokumen perencanaan	Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan	6 dok	210.000.000
308.08.002	b Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Surabaya	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	5 dok	183,750,000	308.08.002	b Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Surabaya	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	5 dok	183,750,000
308.08.004	c Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Surabaya	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	14 dok	200,000,000	308.08.004	c Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Surabaya	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	14 dok	200,000,000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
308.51	Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur	Provinsi Jawa timur	Jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik	51.154	2,665,000,000	308.51	Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur	Provinsi Jawa timur	Jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik	51.154	2,665,000,000
308.51.001	a Penegakan Disiplin	Provinsi Jawa timur	1. Jumlah laporan kegiatan Penegakan disiplin	7 dok	681,145,000	308.51.001	a Penegakan Disiplin	Provinsi Jawa timur	1. Jumlah laporan kegiatan Penegakan disiplin	7 dok	681,145,000
308.51.002	b Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	Provinsi Jawa timur	1. Jumlah dokumen laporan kegiatan Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	6 dok	1,350,569,000	308.51.002	b Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	Provinsi Jawa timur	1. Jumlah dokumen laporan kegiatan Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	6 dok	1,350,569,000
308.51.003	c Pemberdayaan ASN	Provinsi Jawa timur	1. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ASN	6 dok	633,286,000	308.51.003	c Pemberdayaan ASN	Provinsi Jawa timur	1. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ASN	6 dok	633,286,000
308.52	Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri	Provinsi Jawa timur	Persentase peningkatan pembinaan anggota Korpri	87%	3,762,500,000	308.52	Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri	Provinsi Jawa timur	Persentase peningkatan pembinaan anggota Korpri	87%	3,762,500,000
308.52.001	a Penguatan Jiwa Korsia	Provinsi Jawa timur	1. Jumlah laporan rangkaian HUT Korpri 2. Jumlah laporan Paduan Suara 3. Jumlah laporan Pelatihan Pleton Upacara	1 lap 1 lap 1 lap	1,740,931,175	308.52.001	a Peningkatan Jiwa Korsia	Provinsi Jawa timur	1. Jumlah laporan rangkaian HUT Korpri 2. Jumlah laporan Paduan Suara 3. Jumlah laporan Pelatihan Pleton Upacara	1 lap 1 lap 1 lap	1,990,931,175

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
308.52.002	b Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota Korpri	Provinsi Jawa timur	1. Persentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang bermasalah hukum dan ditindaklanjuti 2. Jumlah laporan advokasi hukum dan penanganan perkara anggota Korpri 3. Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga anggota Korpri	85% 1 lap 250 org	1,521,568,825	308.52.002	b Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota Korpri	Provinsi Jawa timur	1. Persentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang bermasalah hukum dan ditindaklanjuti 2. Jumlah laporan advokasi hukum dan penanganan perkara anggota Korpri 3. Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga anggota Korpri	85% 1 lap 250 org	1,771,568,825
	c Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Sekretariat KORPRI	Surabaya	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran UPT Sekretariat Korpri	100 %	500.000.000	308.52.003	c Pelaksanaan Administrasi Perkantoran UPT Sekretariat KORPRI	Surabaya	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran UPT Sekretariat Korpri	100%	500.000.000
308.53	Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN	Provinsi Jawa timur dan kab/kota se Jawa Timur	1. Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi 2. IKM Pelayanan Kepegawaian	98% 85%	3,087,500,000	308.53	Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN	Provinsi Jawa timur dan kab/kota se Jawa Timur	1. Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi 2. IKM Pelayanan Kepegawaian	98% 85%	3,087,500,000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
308.53.001	a Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi	Provinsi Jawa timur dan kab/kota se Jawa Timur	1. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim Baperjakat 2. Persentase Pengisian Jabatan Lowong secara terbuka 3. Persentase Penyelesaian Proses PAK Jabatan Fungsional tertentu	100% 100% 100%	1,477,666,632	308.53.001	a Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi	Provinsi Jawa timur dan kab/kota se Jawa Timur	1. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim Baperjakat 2. Persentase Pengisian Jabatan Lowong secara terbuka 3. Persentase Penyelesaian Proses PAK Jabatan Fungsional tertentu	100% 100% 100%	1,477,666,632
308.53.002	b Pelayanan kenaikan pangkat	Provinsi Jawa timur dan kab/kota se Jawa Timur	IKM pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur	85%	902,679,818	308.53.002	b Pelayanan kenaikan pangkat	Provinsi Jawa timur dan kab/kota se Jawa Timur	IKM pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur	85%	902,679,818
308.53.003	c Pelayanan pensiun dan perpindahan	Provinsi Jawa timur dan kab/kota se Jawa Timur	1. Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan dan formasi 2. IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur	85% 85%	707,153,550	308.53.003	c Pelayanan pensiun dan perpindahan	Provinsi Jawa timur dan kab/kota se Jawa Timur	1. Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan dan formasi 2. IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur	85% 85%	707,153,550
308.54	Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan	Provinsi Jawa timur dan kab/kota se Jawa	Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan	99%	2,696,125,000	308.54	Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN	Provinsi Jawa timur dan kab/kota	Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini,	99%	2,696,125,000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
	pengadaan ASN	Timur	dapat dipertanggungjawabkan					se Jawa Timur	lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan		
308.54.001	a Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	Provinsi Jawa timur dan kab/kota se Jawa Timur	Persentase database kepegawaian yang lengkap	98%	1,648,000,000	308.54.001	a Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	Provinsi Jawa timur dan kab/kota se Jawa Timur	Persentase database kepegawaian yang lengkap	98%	1,648,000,000
308.54.002	b Perencanaan kepegawaian dan formasi	Provinsi Jawa timur	Jumlah dokumen kegiatan Perencanaan kepegawaian dan formasi	2 dok	591,250,000	308.54.002	b Perencanaan kepegawaian dan formasi	Provinsi Jawa timur	Jumlah dokumen kegiatan Perencanaan kepegawaian dan formasi	2 dok	591,250,000
308.54.003	c Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN	Provinsi Jawa timur dan kab/kota se Jawa Timur	1. Persentase peserta yang lolos Seleksi administrasi pendaftaran pegawai ASN dan Non ASN 2. Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN 3. Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT 4. Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan Non ASN	100% 1 lap 1 dok 1 kali / keg	456,875,000	308.54.003	c Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN	Provinsi Jawa timur dan kab/kota se Jawa Timur	1. Persentase peserta yang lolos Seleksi administrasi pendaftaran pegawai ASN dan Non ASN 2. Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN 3. Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT 4. Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan Non ASN	100% 1 lap 1 dok 1 kali / keg	456,875,000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET	Pagu Indikatif (Rp)
308.55	Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Provinsi Jawa timur	Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji kompetensi	90%	2,672,500,000	308.55	Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Provinsi Jawa timur	Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji kompetensi	90%	2,672,500,000
308.55.001	a Pembinaan Karir	Provinsi Jawa timur	1. Jumlah dokumen pelaporan kegiatan pembinaan karir 2. Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir 3. Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar	6 dok 80% 100%	702,759,675	308.55.001	a Pembinaan Karir	Provinsi Jawa timur	1. Jumlah dokumen pelaporan kegiatan pembinaan karir 2. Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir 3. Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar	6 dok 80% 100%	702,759,675
308.55.002	b Penilaian Kompetensi	Provinsi Jawa timur	1. Jumlah dokumen kegiatan Penilaian kompetensi	7 dok	1,269,667,714	308.55.002	b Penilaian Kompetensi	Provinsi Jawa timur	1. Jumlah dokumen kegiatan Pengembangan kompetensi	7 dok	1,269,667,714
308.55.003	c Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Provinsi Jawa timur	Jumlah dokumen kegiatan Penyusunan Penetapan standar kompetensi jabatan dan pola karir	4 dok	700,072,611	308.55.003	c Penyusunan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karir	Provinsi Jawa timur	Jumlah dokumen kegiatan Penyusunan Penetapan standar kompetensi jabatan dan pola karir	4 dok	700,072,611
Total Belanja Langsung					29,000,000,000	Total Belanja Langsung					29,000,000,000

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Keberhasilan program dan kegiatan haruslah didukung dengan anggaran yang memadai, oleh sebab itu perlu juga perencanaan pendanaan indikatif Program dan Kegiatan Badan kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.

Tabel. 2.9

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
I.	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Surabaya	Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	85 %	
1.	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Surabaya	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%	
II.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Surabaya	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	
1.	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Surabaya	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	135 unit	
2.	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Surabaya	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	135 unit	
III.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Surabaya	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	
1.	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Konsultasi	60 kali	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
2.	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Surabaya	1. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 2. Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	124 Orang 124 Orang	
IV.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Surabaya	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan	Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dok	
2.	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Surabaya	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	6 dok	
3.	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Surabaya	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	14 dok	
V.	Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendetayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur	Provinsi Jawa Timur	Jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik	51.154 pegawai	
1.	Penegakan Disiplin	Provinsi Jawa Timur	1. Jumlah laporan kegiatan Penegakan disiplin	7 dok	
2.	Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	Provinsi Jawa Timur	1. Jumlah dokumen laporan kegiatan Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	6 dok	
3.	Pemberdayaan ASN	Provinsi Jawa Timur	1. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ASN	6 dok	

VI.	Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri	Provinsi Jawa Timur	Persentase peningkatan pembinaan anggota Korpri	87%	
1.	Penguatan Jiwa Korsa	Provinsi Jawa Timur	1. Jumlah laporan rangkaian HUT Korpri 2. Jumlah laporan Paduan Suara 3. Jumlah laporan Pelatihan Pleton Upacara	1 lap 1 lap 1 lap	
2.	Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota Korpri	Provinsi Jawa Timur	1. Persentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang bermasalah hukum dan ditindaklanjuti 2. Jumlah laporan advokasi hukum dan penanganan perkara anggota Korpri 3. Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga anggota Korpri	85% 1 lap 250 orang	
3.	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran UPT Sekretariat KORPRI	Surabaya	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran UPT Sekretariat KORPRI	100%	
VII.	Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN	Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	1. Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi 2. IKM Pelayanan Kepegawaian	98% 85	
1.	Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi	Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	1. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim Baperjakat 2. Persentase Pengisian Jabatan Lowong secara terbuka 3. Persentase Penyelesaian Proses PAK Jabatan Fungsional tertentu	100% 100% 100%	

2.	Pelayanan kenaikan pangkat	Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	IKM pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur	85%	
3.	Pelayanan pensiun dan perpindahan	Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	1. Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan dan formasi 2. IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur	85% 85	
VIII.	Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN		Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	99%	
1.	Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	Jawa Timur	Persentase database kepegawaian yang lengkap	98%	
2.	Perencanaan kepegawaian dan formasi	Jawa Timur	Jumlah dokumen kegiatan Perencanaan kepegawaian dan formasi	2 dok	
3.	Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN	Jawa Timur	1. Persentase peserta yang lolos Seleksi administrasi pendaftaran pegawai dan non ASN 2. Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN 3. Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT 4. Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan Non ASN	100% 1 lap 1 dok 1 kali / keg	
IX.	Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)		Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji kompetensi	90%	
1.	Pembinaan Karir	Jawa Timur	1. Jumlah dokumen pelaporan kegiatan pembinaan karir	6 dok	

			2. Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir 3. Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar	80% 100%	
2.	Penilaian Kompetensi	Jawa Timur	1. Jumlah dokumen kegiatan Penilaian kompetensi	7 dok	
3.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jawa Timur	Jumlah dokumen kegiatan Penyusunan standar kompetensi jabatan	4 dok	

Rencana pendanaan indikatif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dirinci sesuai sumber pendanaannya APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp **29.000.000.000** (Dua Puluh Sembilan Milyard Rupiah)

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Kebijakan

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan terkait dengan agenda Gubernur Jawa Timur, salah satunya yaitu percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik ada 4 (empat) isu strategis yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepegawaian dengan sasaran peningkatan kualitas tenaga pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, kualitas mekanisme/prosedur/SOP pelayanan ditetapkan kebijakan:
 - a. Mengembangkan konsep indeks tingkat kepuasan masyarakat (IKM);
 - b. Mengembangkan sistem informasi layanan kepegawaian;
 - c. Meningkatkan standar mutu layanan kepegawaian dengan memperbaiki SOP pelayanan yang transparan, sederhana, tidak rumit, dan mudah dimengerti;
 - d. Mengembangkan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik;
 - e. Pembangunan fasilitas pelayanan dalam rangka pengembangan jenis layanan;
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (hardware dan software) sebagai pendukung utama kelembagaan.
2. Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur atau PNS yang profesional dengan sasaran terwujudnya PNS yang memiliki pengetahuan, keterampilan, integritas, disiplin, dan perilaku kerja produktif yang amanah, serta berdedikasi tinggi ditetapkan kebijakan:
 - a. Mengembangkan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis kompetensi;
 - b. Mengembangkan nilai-nilai budaya kerja, etos kerja PNS dan kedisiplinan PNS;
 - c. Menegakkan aturan kepegawaian dan disiplin PNS;

3. Upaya meningkatkan kualitas penataan SDM Aparatur yang ideal atau *Right Sizing* sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya, ditetapkan kebijakan:
 - a. Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan jabatan/keahlian sehingga setiap Pegawai mempunyai jabatan yang jelas, dan agar tidak terjadi inefisiensi dalam penggunaan Sumber Daya.
 - b. Pendistribusian pegawai sesuai dengan ketrampilan dan kompetensinya serta kebutuhan organisasi;
 - c. Pemetaan dan bezzeting SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi secara rutin dan berkala dalam rangka menciptakan komposisi SDM Aparatur yang ideal berdasarkan Analisis jabatan dan Beban Kerja (ABK).
 - d. Menegakkan nilai-nilai netralitas, kedisiplinan PNS dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
4. Upaya meningkatkan kesejahteraan SDM Aparatur dengan sasaran terwujudnya peningkatan remunerasi sesuai dengan kebutuhan hidup dan pemberian reward berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja ditetapkan kebijakan:
 - a. Meningkatkan pemberian penghargaan, reward, dan kompensasi berbasis kinerja dan menyusun pedoman pemberian reward (selain kenaikan pangkat);
 - b. Pembekalan bagi SDM Aparatur yang akan purna tugas;
 - c. Pemberian tambahan penghasilan bagi SDM Aparatur yang akan purna tugas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dan Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ditetapkan tujuan strategis Dalam rangka untuk mewujudkan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ditetapkan tujuan strategis yaitu **Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah.**

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh peningkatan kualitas penataan SDM Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dan kebutuhan. Selain itu juga terbentuknya pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur yang disiplin, integritas, mengedepankan kompetensi yang memadai dan bekerja dengan dedikasi yang tinggi serta dan berorientasi pada prestasi kerja yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai. Serta didukung dengan sistem informasi database kepegawaian ASN yang terintegrasi dengan penilaian kinerja termasuk peta jabatan dan integrasi sistem aplikasi pencatatan kerja pegawai dengan pengisian dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan sasaran kerja pegawai

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan hasil indentifikasi potensi permasalahan internal dan eksternal untuk mencapai tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun sasaran strategis BKD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur.

Dengan mempertimbangkan misi Gubernur Jawa Timur, terutama untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, maka ditetapkan indikator-indikator keberhasilan sasaran strategis ini mencakup penataan pegawai yang sesuai dengan formasi kebutuhan dan kompetensi sehingga tugas dan tanggungjawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh dedikasi. Oleh karena itu pada sasaran didukung dengan upaya-upaya, antara lain: (1) didistribusi ASN dalam rangka penataan dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan pada hasil pemetaan, (2) pengalihfungsian pegawai ASN dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional tertentu dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional, (3) rekrutmen CPNS dengan sistem CAT, dan (4) pengisian jabatan lowong secara terbuka.

b. Meningkatnya kualitas data pegawai ASN yang Akurat.

Pelaksanaan akurasi database pegawai minimal data pokok terkini dari masing-masing pegawai ASN lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan updating data pegawai ini untuk mempermudah berbagai pelayanan kepegawaian berbasis elektronik/*online* dan *paperless*. Hal ini sejalan dengan telah dipilihnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur oleh BKN sebagai *pilot project* pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi (TI) meliputi Kenaikan Pangkat dan Pensiun *Less Paper Online*, serta dalam rangka mencapai tujuan strategis Mewujudkan Sistem

Informasi *database* Kepegawaian ASN yang terintegrasi. Keseluruhan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang dinamakan e-PAKET (Pelayanan Administrasi Kepegawaian Terpadu), meliputi : kenaikan pangkat, pensiun, data pegawai ASN, perpindahan pegawai, disiplin pegawai, penilaian kinerja, penyusunan formasi pegawai, seleksi dan rekrutmen, ujian dinas dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian pindah jabatan, layanan pengaduan, layanan tabungan pensiun, dan ijin belajar.

c. Meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sasaran ini untuk melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib bertanggung jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit yaitu kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul, jenis kelamin, umur atau kondisi kecacatan. Untuk mencapai sasaran ini, upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain: (1) penyusunan penetapan standar kompetensi jabatan dan pola karir, (2) Uji kompetensi pindah formasi jabatan, (3) penyusunan dokumen Analisa Kebutuhan Pengembangan Aparatur, (4) Development *center* bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur, (5) pengembangan karir dan *talent pool*.

d. Meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sasaran ini merupakan bentuk keselarasan dengan sasaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara yaitu Indeks Profesionalitas ASN, yaitu sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Dalam rangka mewujudkan profesionalitas PNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menetapkan beberapa perubahan dalam manajemen ASN. Perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (ASN) yang berintegritas dan profesional. Faktor-

faktor yang mempengaruhi perhitungan indeks profesionalitas ASN adalah tingkat kompetensi, tingkat kinerja, besaran kompensasi, dan tingkat pelanggaran disiplin pegawai ASN.

Tabel 3.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur	Persentase pegawai ASN yang tertata sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi	98%
Meningkatnya kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Persentase ASN Pemprov Jawa Timur yang mengikuti uji kompetensi dan lulus	90%
Meningkatnya kualitas data pegawai ASN yang Akurat	Persentase tingkat akurasi database kepegawaian	95%
Meningkatnya profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Persentase pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik	100%

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program-program tersebut berjumlah 9 Program diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan
5. Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur
6. Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri
7. Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN
8. Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN
9. Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dan dijabarkan dengan 23 kegiatan diantaranya :

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
2. Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
3. Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan parasarana
4. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
5. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
6. Penyusunan dokumen perencanaan
7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran
8. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
9. Penegakan Disiplin
10. Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja
11. Pemberdayaan ASN
12. Penguatan Jiwa Korsa
13. Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota Korpri
14. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran UPT Sekretariat KORPRI
15. Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi
16. Pelayanan kenaikan pangkat
17. Pelayanan pensiun dan perpindahan
18. Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai
19. Perencanaan kepegawaian dan formasi

20. Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN
21. Pembinaan Karir
22. Penilaian Kompetensi
23. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

3.4 Rumusan Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program :

Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

Indikator Kinerja Kegiatan :

Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Indikator kinerja program peningkatan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program :

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
- b. Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program :

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Jumlah Konsultasi
- b. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal
- c. Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM

4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Indikator kinerja Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program :

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
 - b. Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun
 - c. Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun
5. Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program :

Jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Jumlah laporan kegiatan Penegakan disiplin
 - b. Jumlah dokumen laporan kegiatan Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja
 - c. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ASN
6. Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program :

Persentase peningkatan pembinaan anggota Korpri

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Jumlah laporan rangkaian HUT Korpri
- b. Jumlah laporan Paduan Suara
- c. Jumlah laporan Pelatihan Peleton Upacara
- d. Persentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang bermasalah hukum dan ditindaklanjuti
- e. Jumlah laporan advokasi hukum dan penanganan perkara anggota Korpri
- f. Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga anggota Korpri
- g. Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran UPT Sekretariat KORPRI

7. Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program :

1. Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi
2. IKM Pelayanan Kepegawaian

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim Baperjakat
 - b. Persentase Pengisian Jabatan Lowong secara terbuka
 - c. Persentase Penyelesaian Proses PAK Jabatan Fungsional tertentu
 - d. IKM pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur
 - e. Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan dan formasi
 - f. IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur
8. Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program :

Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Persentase database kepegawaian yang lengkap
 - b. Jumlah dokumen kegiatan Perencanaan kepegawaian dan formasi
 - c. Persentase peserta yang lolos Seleksi administrasi pendaftaran pegawai dan non ASN
 - d. Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN
 - e. Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT
 - f. Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan Non ASN
9. Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program :

Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji kompetensi

Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Jumlah dokumen pelaporan kegiatan pembinaan karir

- b. Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir
- c. Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar
- d. Jumlah dokumen kegiatan penilaian kompetensi
- e. Jumlah dokumen kegiatan Penyusunan standar kompetensi jabatan

3.5 Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 adalah Seluruh Aparatur Sipil Negara Baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota se Jawa Timur

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
308.01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	Surabaya	85%	4,611,474,155	APBD	
308.01.019	a. Pelaksanaan administrasi perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	Surabaya	100%	4,611,474,155	APBD	
308.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Surabaya	100%	6,480,721,595	APBD	
308.02.012	a Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	Surabaya	135 unit	2,969,681,833	APBD	
308.02.031	b Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	Surabaya	135 unit	3,511,039,762	APBD	
308.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	Surabaya	100%	2,540,429,250	APBD	
308.07.001	a Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	Surabaya	60 kali	1,369,845,625	APBD	
308.07.002	b Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	1. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	Surabaya	124 org	1,170,583,625	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
		2. Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM		124 org			
308.08	Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Surabaya	100%	483,750,000	APBD	
308.08.001	a Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Surabaya	6 dok	210.000.000	APBD	
308.08.002	b Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Surabaya	5 dok	183,750,000	APBD	
308.08.003	c Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	Surabaya	4 dok	200,000,000	APBD	
308.51	Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendeteksi dan Penanganan Aparatur	Jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik		51.154	2,665,000,000	APBD	
308.51.001	a Penegakan Disiplin	1. Jumlah laporan kegiatan Penegakan disiplin	Provinsi Jawa timur	7 dok	681,145,000	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
308.51.002	b Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	1. Jumlah dokumen laporan kegiatan Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	Provinsi Jawa timur	6 dok	1,350,569,000	APBD	
308.51.003	c Pemberdayaan ASN	1. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ASN	Provinsi Jawa timur	6 dok	633,286,000	APBD	
308.52	Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri	Persentase peningkatan pembinaan anggota Korpri	Provinsi Jawa timur	87%	3,762,500,000	APBD	
308.52.001	a Penguatan Jiwa Korsa	1. Jumlah laporan rangkaian HUT Korpri 2. Jumlah laporan Paduan Suara 3. Jumlah laporan Pelatihan Pleton Upacara	Provinsi Jawa timur	1 lap 1 lap 1 lap	1,740,931,175	APBD	
308.52.002	b Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota Korpri	1. Persentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang bermasalah hukum dan ditindaklanjuti 2. Jumlah laporan advokasi hukum dan penanganan perkara anggota Korpri 3. Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga	Provinsi Jawa timur	85% 1 lap 250 orang	1,521,568,825	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
		anggota Korpri					
308.52.xxx	a. Pelaksanaan administrasi perkantoran UPT Sekretariat KORPRI	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	Surabaya	100%	500.000.000		
308.53	Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN	1. Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi 2. IKM Pelayanan Kepegawaian	Provinsi Jawa timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	98% 85%	3,087,500,000	APBD	
308.53.001	a Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi	1. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim Baperjakat 2. Persentase Pengisian Jabatan Lowong secara terbuka 3. Persentase Penyelesaian Proses PAK Jabatan Fungsional tertentu	Provinsi Jawa timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	100% 100% 100%	1,477,666,632	APBD	
308.53.002	b Pelayanan kenaikan pangkat	IKM pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	85%	902,679,818	APBD	
308.53.003	c Pelayanan pensiun dan perpindahan	1. Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan dan	Provinsi Jawa timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	85%	707,153,550	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
		formasi 2. IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur		85%			
308.54	Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN	Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	Provinsi Jawa timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	99%	2,696,125,000	APBD	
308.54.001	a Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	Persentase database kepegawaian yang lengkap	Provinsi Jawa timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	100%	1,648,000,000	APBD	
308.54.002	b Perencanaan kepegawaian dan formasi	Jumlah dokumen kegiatan Perencanaan kepegawaian dan formasi	Provinsi Jawa timur	2 dok	591,250,000	APBD	
308.54.003	c Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN	1. Persentase peserta yang lolos Seleksi administrasi pendaftaran pegawai dan non ASN 2. Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN 3. Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT	Provinsi Jawa timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	100% 1 lap 1 dok	456,875,000	APBD	

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
		4. Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan Non ASN		1 kali / keg			
308.55	Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji kompetensi	Provinsi Jawa timur	90%	2,672,500,000	APBD	
308.55.001	a Pembinaan Karir	1. Jumlah dokumen pelaporan kegiatan pembinaan karir 2. Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir 3. Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar	Provinsi Jawa timur	6 dok 80% 100%	702,759,675	APBD	
308.55.002	b Penilaian Kompetensi	1. Jumlah dokumen kegiatan penilaian kompetensi	Provinsi Jawa timur	7 dok	1,269,667,714	APBD	
308.55.003	c Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah dokumen kegiatan Penyusunan Penetapan standar kompetensi jabatan dan pola karir	Provinsi Jawa timur	4 dok	700,072,611	APBD	
	Total Belanja Langsung				29.000.000.000		

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Provinsi Jawa Timur

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 08 01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	Surabaya	85 %	4,611,474,155	APBD	Program PendukungOperasional SKPD (Rutin) sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang kepegawaian	85	4,957,334,717
3 08 01 019	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	Surabaya	100%	4,611,474,155	APBD		100%	4,957,334,717
3 08 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Surabaya	100%	6,480,721,595	APBD	Program PendukungOperasional SKPD (Rutin) sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang kepegawaian	100%	7,366,775,714
3 08 02 012	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	Surabaya	135 unit	2,969,681,833	APBD		135 unit	3,592,407,970
3 08 02 031	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang	Surabaya	135 unit	3,511,039,762	APBD		135 unit	3,774,367,744

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	08	07		dan prasarana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	terpelihara Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	Surabaya	100%	2,540,429,250	APBD	Program Pendukung Operasional SKPD (Rutin) sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang kepegawaian	100%	2,730,961,444
3	08	07	001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Konsultasi	Surabaya	60 kali	1,369,845,625	APBD		60 kali	1,472,584,047
3	08	07	002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	1. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal 2. Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	Surabaya	124 org	1,170,583,625	APBD		124 org	1,258,377,397
3	08	08		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Surabaya	100%	483,750,000	APBD	Program Pendukung Operasional SKPD (Rutin) sebagai sarana penunjang pelayanan publik di bidang kepegawaian	100%	520,031,250
3	08	08	001	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Surabaya	6 dok	210.000.000	APBD		6 dok	120,031,250
3	08	08	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Surabaya	5 dok	183,750,000	APBD		5 dok	190,000,000
3	08	08	003	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	Surabaya	14 dok	200,000,000	APBD		14 dok	210,000,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 08 51	Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur	Jumlah pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang mempunyai nilai SKP (minimal) Baik	Provinsi Jawa Timur	51.154 pegawai	2,665,000,000	APBD	Program Prioritas Gubernur terkait dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur misi ke 4 :	51.154	2,842,375,000
3 08 51 001	Penegakan Disiplin	1. Jumlah laporan kegiatan Penegakan disiplin	Provinsi Jawa Timur	7 dok	681,145,000	APBD	"Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik" dan Pemikiran Dasar Nawa Cita "Melakukan Revolusi arakter Bangsa (Revolusi Mental) "	7 dok	724,730,875
3 08 51 002	Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	1. Jumlah dokumen laporan kegiatan Kesejahteraan aparatur dan penilaian kinerja	Jawa Timur	6 dok	1,350,569,000	APBD		6 dok	1,444,361,675
3 08 51 003	Pemberdayaan ASN	1. Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ASN	Jawa Timur	6 dok	633,286,000	APBD		6 dok	673,282,450

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	08	52										
3	08	52	001	Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri Peningkatan Jiwa Korsa 1. Jumlah laporan rangkaian HUT Korpri 2. Jumlah laporan Paduan Suara 3. Jumlah laporan Pelatihan Paskibra	Provinsi Jawa Timur	87%	3,762,500,000	APBD	Program Prioritas Gubernur terkait dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur misi ke 4 : "Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik" dan Pemikiran Dasar Nawa Cita "Melakukan Revolusi arakter Bangsa (Revolusi Mental) "	90%	4,044,687,500	
3	08	52	002	Perlindungan, Advokasi Hukum dan Kesejahteraan anggota Korpri 1. Persentase fasilitasi penanganan perkara anggota KORPRI yang bermasalah hukum dan ditindaklanjuti 2. Jumlah laporan advokasi hukum dan penanganan perkara anggota Korpri 3. Jumlah bantuan peralatan sekolah bagi putra putri keluarga anggota Korpri	Provinsi Jawa Timur	85%	1,771,568,825	APBD		1 lap 1 lap 1 lap	90%	1,904,436,487
3	08	52	xxx	Pelaksanaan administrasi perkantoran UPT Sekretariat KORPRI Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran UPT Sekretariat KORPRI	Surabaya	100%						

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2019				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
3	08	53										
3	08	53	001	Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi	1. Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi 2. IKM Pelayanan Kepegawaian 1. Persentase rekomendasi pejabat struktural hasil evaluasi tim Baperjakat 2. Persentase Pengisian Jabatan Lowong secara terbuka 3. Persentase Penyelesaian Proses PAK Jabatan Fungsional tertentu	Provinsi Jawa Timur dan kab/kota di Jawa Timur Provinsi Jawa Timur dan kab/kota di Jawa Timur	98% 85% 100% 100% 100%	3,087,500,000 1,477,666,632	APBD APBD	Program Prioritas Gubernur terkait dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur misi ke 4 : "Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik" dan Undang - Undang No 23 Tahun 2014 ttg pemerintah Daerah	99,5% 85% 100% 100% 100%	3,689,062,500 1,773,491,630
3	08	53	002	Pelayanan kenaikan pangkat	IKM pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur dan kab/kota di Jawa Timur	85%	902,679,818	APBD	85,5%	1,062,880,804	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 08 53 003	Pelayanan pensiun dan perpindahan	1. Persentase pendistribusian pegawai sesuai dengan perencanaan dan formasi 2. IKM pelayanan pensiun dan perpindahan pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur/ Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur dan kab/kota di Jawa Timur	85% 85%	707,153,550	APBD		85,5%	852,690,066
3 08 54	Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN	Persentase database kepegawaian yang berkualitas, relevan, terkini, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	Provinsi Jawa Timur dan kab/kota di Jawa Timur	99%	2,696,125,000	APBD	Program Prioritas Gubernur terkait dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur misi ke 4 :	100%	2,890,834,375
3 08 54 001	Penguatan sistem informasi dan pengolahan database pegawai	Persentase database kepegawaian yang lengkap	Provinsi Jawa Timur	100%	1,648,000,000	APBD	"Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik" dan Undang - Undang No 23 Tahun 2014 ttg pemerintah Daerah	100%	1,764,100,000
3 08 54 002	Perencanaan kepegawaian dan formasi	Jumlah dokumen kegiatan Perencanaan kepegawaian dan formasi	Provinsi Jawa Timur	2 dok	591,250,000	APBD		2 dok	635,593,750
3 08 54 003	Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN	1. Persentase peserta yang lolos Seleksi administrasi pendaftaran pegawai dan Non ASN	Provinsi Jawa Timur dan kab/kota	100% 1 lap	456,875,000	APBD		100% 1 lap	491,140,625

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2019			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		2. Jumlah laporan kegiatan fasilitasi penerimaan Calon Praja IPDN 3. Jumlah dokumen penyusunan bank soal CAT 4. Jumlah pelaksanaan ujian ASN pelamar umum dan non ASN	di Jawa Timur	1 dok 1 kali / keg				1 dok 1 kali / keg			
3	08	55									
	Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji kompetensi	Jawa Timur	90%	2,672,500,000	APBD	Program Prioritas Gubernur terkait dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur misi ke 4 : "Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik" dan Undang - Undang No 23 Tahun 2014 ttg pemerintah Daerah	97%	2,857,937,500		
3	08	55	001	Pembinaan Karir	1. Jumlah dokumen pelaporan kegiatan pembinaan karir 2. Persentase SKPD yang telah menyusun dan menerapkan pola karir 3. Persentase penyelesaian proses izin belajar dan tugas belajar	Jawa Timur	6 dok 80% 100%	702,759,675	APBD	6 dok 85% 100%	755,466,650
3	08	55	002	Penilaian Kompetensi	1. Jumlah dokumen kegiatan Penilaian kompetensi	Jawa Timur	7 dok	1,269,667,714	APBD	7 dok	1,357,392,793

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 08 55 003	Penyusunan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karir	Jumlah dokumen kegiatan Penyusunan Penetapan standar kompetensi jabatan dan pola karir	Jawa Timur	4 dok	700,072,611	APBD		4 dok	745,078,057

BAB 4

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2018. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2014–2019.

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018, Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan good governance di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd

SISWO HEROETOTO, S.H., M.Hum., M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19580227 198503 1 007